# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi secara selaras, adil dan merata. Indonesia memilki koperasi sebagai landasan perekonomian bangsa. Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing mengenai ekonomi mereka dan Indonesia memilih koperasi sebagai salah satu cara menstabilkan ekonomi negara.

Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan. Dalam halnya koperasi memiliki berbagai macam bidang, yang salah satunya yaitu simpan pinjam.

Menurut Undang Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, pengertian prosedur pemberian pinjaman adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemohon pinjaman, petugas dan pejabat pinjaman serta pihak yang terkait lainnya serta kelengkapan administrasi/formulir-formulir yang diperlukan dalam proses permohonan pinjaman hingga saat pencairan pinjaman.

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara

koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan ( Ahmad Subagyo: 2014:23).

Faktanya hampir diseluruh daerah sistem pada koperasi belum terkomputerisasi dan prosedur pemberian pinjaman masih bersifat manual sehingga menjadi hambatan bagi kecepatan, kemudahan serta akurasi data yang mengalir. Yang dimaksud dengan prosedur pemberian pinjaman masih manual itu yaitu pada saat penginputan data anggota yang akan melakukan pinjaman itu masih dengan menggunakan buku sedangkan itu akan sangat menghambat waktu. Selain itu laporan disajikan masih sangat lambat karena masih menggunakan arsip yang tersimpan dalam buku penyimpanan dan harus mencari satu persatu. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan sistem administrasi yang masih manual serta pengurus koperasi yang sangat terbatas, maka akan menimbulkan lambannya kinerja koperasi tersebut.

Permasalahan lain terkait prosedur pemberian pinjaman itu sendiri yaitu masih banyak penyelewengan oleh peminjam (Dyah Kirana. 2011).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Hikmah Kecamatan Labuan merupakan lembaga keuangan ekonomi swadaya guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Labuan dengan sistem bagi hasil. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KP-RI Hikmah Kecamatan Labuan untuk merealisasikan tujuannya yaitu memberikan fasilitas pinjaman kepada anggotanya.

Prosedur pemberian pinjaman pada KP-RI Hikmah Labuan masih bersifat manual. Dalam pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman anggota harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pinjaman. Tetapi faktanya masih banyak pihak-pihak yang belum memenuhi SOP tersebut, seperti banyaknya dokumen persyaratan yang masih belum lengkap sehingga memperlambat proses pencairan dana. Selain itu juga masih banyak anggota yang menunggak dalam pembayaran karena gajinya telah habis dipotong oleh tagihan yang lain, seperti Bank dan sebagainya (Kosim, Sekretaris, 2016).

Untuk bisa mengontrol agar pinjaman menjadi lancar maka perlu adanya prosedur yang baik serta pengolahan data anggota yang masih manual bisa memanfaatkan sistem yang sudah terkomputerisasi karena dengan adanya prosedur yang baik akan membantu mengurangi risiko pinjaman atau piutang yang tidak lancar.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menjadikannya sebagai alasan penulisan tugas akhir yang berjudul "**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN PADA KP-RI HIKMAH LABUAN PANDEGLANG".**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian pinjaman yang digunakan masih manual seperti penginputan data anggota yang akan melakukan pinjaman itu masih menggunakan buku dan itu menjadi hambatan bagi kecepatan, kemudahan serta akurasi data yang mengalir.
2. Masih banyak terjadinya penyelewengan oleh pihak yang bersangkutan dan belum memenuhi SOP persyaratan yang digunakan, seperti banyaknya dokumen yang masih belum lengkap tetapi dana tetap dicairkan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman pada Koperasi Hikmah Kecamatan Labuan ?
2. Dokumen apa saja yang digunakan dalam prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Hikmah Kecamatan Labuan ?

## 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian pinjaman pada KP-RI Hikmah Kecamatan Labuan.

### 1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pinjaman pada KP-RI Hikmah Kecamatan Labuan.
2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang terkait dalam pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman pada KP-RI Hikmah Kecamatan Labuan.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

### 1.5.1 Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai tambahan pertimbangan dan membantu pengambilan keputusan serta bermanfaat bagi perkembangan perusahaan tersebut. Serta dapat mengetahui permasalahan yang terjadi terutama tentang prosedur pemberian pinjaman pada KP-RI Hikmah Kecamatan Labuan.

### 1.5.2 Kegunaan Akademis

Untuk membantu dan menambah referensi ilmiah pada penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman pada KP-RI Hikmah Kecamatan Labuan.

## 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di KP-RI Hikmah JL. Jenderal Sudirman No.100 Telp. (0253)801149 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

### 1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dari taggal 1 Maret 2017 sampai 1 Juni 2017.

| No | Deskripsi Kegiatan | 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agu |
| 1. | **Tahap Persiapan** | | | | | | | | |
| | a. Persiapan Judul | ■ | | | | | | | |
| | b. Persiapan Teori | ■ | | | | | | | |
| | c. Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | |
| | d. Mencari Perusahaan | | ■ | | | | | | |
| 2. | **Tahap Pelaksanaan** | | | | | | | | |
| | a. Mengajukan Surat Pengantar Perusahaan | | | ■ | | | | | |
| | b. Pengumpulan data | | | | ■ | | | | |
| | c. Melakukan Penelitian | | | | ■ | | | | |
| 3. | **Tahap Pelaporan** | | | | | | | | |
| | a. Bimbingan Laporan Tugas Akhir | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| | b. Revisi Laporan Tugas Akhir | | | | | ■ | ■ | | |
| 4. | **Tahap Pengujian** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a. Sidang | | | | | | | | |
| | b. Revisi Laporan Tugas Akhir | | | | | | | | |

*Tabel 1.1*
*Waktu Penelitian*